

AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Ietje Nazaruddin, Ilham Maulana Saud, Sri Budhi Rezki, Fitri Wahyuni, Evi Rahmawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: ietje.nazaruddin@umy.ac.id

ABSTRAK

Administrasi kependudukan merupakan program yang penting, karena data kependudukan merupakan informasi yang berguna untuk pengambilan kebijakan guna memajukan pemerintahan daerah. Administrasi kependudukan di Dusun Dlingo I dan II saat ini bersifat manual dan data belum disesuaikan dengan kondisi terkini. Berdasarkan kondisi tersebut upaya peningkatan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi khususnya administrasi kependudukan akan meningkatkan akuntabilitas publik. Pengelolaan Administrasi kependudukan yang baik diharapkan informasi kependudukan menjadi transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin.

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah membuat database kependudukan dengan bantuan teknologi informasi, serta mempermudah beberapa kegiatan pamong dalam membuat administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan dengan menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas data maupun informasi. Pengguna dapat mengolah informasi kependudukan dengan lebih cepat dan sesuai dengan keinginan. Metode pelaksanaan program dimulai dari observasi awal, merumuskan permasalahan, sosialisasi dan diakhiri dengan pendampingan serta pelaporan.

Hasil pengabdian masyarakat ini akan meningkatkan kemampuan para pengurus tingkat Dusun dalam melakukan manajemen administrasi kependudukan. Hasil program adalah database administrasi kependudukan yang terdigitalisasi sehingga data semakin akurat. Database kependudukan juga bisa diolah sesuai kebutuhan.

Manajemen administrasi kependudukan yang baik akan mewujudkan administrasi yang tertib. Data kependudukan yang akurat merupakan sumber data dan informasi dalam mengelola pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, membina dan memberdayakan masyarakat.

Kata kunci: akuntabilitas, desa, administrasi kependudukan.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan suatu pertanggungjawaban serta memberikan jawaban dan memberikan keterangan mengenai kinerja maupun tindakan individu, badan hukum ataupun pimpinan kolektif serta organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan maupun pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga didefinisikan sebagai suatu konsep etika yang berkaitan erat dengan administrasi publik pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Akuntabilitas sering disetarakan dengan *responsibility*, *answerability* dan mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah (Djalil, Rizal, 2014). Membangun transparansi akuntabilitas pada publik perlu dilakukan pemerintah agar mendapatkan *trust* atau kepercayaan dari masyarakatnya (Lukito, 2014)

Penataan administrasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Administrasi desa adalah proses pencatatan data dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa didalam buku Administrasi Desa. Administrasi Desa ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri,



sedangkan teknis pembinaan dan pelaksanaan operasionalnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Administrasi desa didasarkan pula pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Administrasi kependudukan desa merupakan proses pencatatan data serta informasi yang berkaitan dengan kependudukan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa. Tata kelola sistem administrasi kependudukan yang baik akan berdampak pada keakuratan data sehingga dapat menjadi masukan pemerintah didalam penyusunan program-program yang mendukung perbaikan dan kemajuan desa. Data kependudukan juga terkait dengan distribusi penduduk, jumlah penduduk, kelahiran, kematian dan lai lain. Undang-undang No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa desa Dlingo (Dusun Dlingo I dan Dlingo II) memiliki permasalahan mengenai data kependudukan. Data Kependudukan masih dalam bentuk kartu keluarga, dan belum ada data base kependudukan yang berbasis teknologi informasi. Hal ini berdampak butuh waktu yang lama ketika data tersebut akan dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini akan mengulas mengenai akuntabilitas publik dengan tata kelola administrasi kependudukan dengan berbasis informasi teknologi pada desa Dlingo, khususnya Dlingo 1 dan Dlingo II.

METODOLOGI

Metode pelaksanaan program peningkatan akuntabilitas melalui penataan administrasi kependudukan, dimulai dari observasi awal. Observasi awal ditujukan untuk memperoleh permasalahan-permasalahan tentang adminitrasi kependudukan yang ada pada desa Dlingo. Tahap selanjutnya adalah tahapan persiapan. Pada tahap persiapan, ketua tim dan anggota tim akan mengumpulkan dan menghimpun data-data yang diperlukan pada tahap pelaksanaan, seperti materi pelatihan, software yang dapat digunakan dalam penyusunan data base kependudukan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan desa terkait. Setelah seluruh persiapan dilakukan, maka ketua tim dan anggota tim akan memberikan pengarahan, pembekalan dan pelatihan. Tim mengevaluasi pemahaman tim guna memastikan bahwa setiap anggota tim telah memahami administrasi kependudukan dan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pendataan data kependudukan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan dua metode yaitu penyuluhan tentang arti penting adminitrasi khususnya administrasi kependudukan dan pembuatan database dan diakhiri dengan pendampingan. Penjelasan atas metode tersebut diuraikan sebagai berikut.

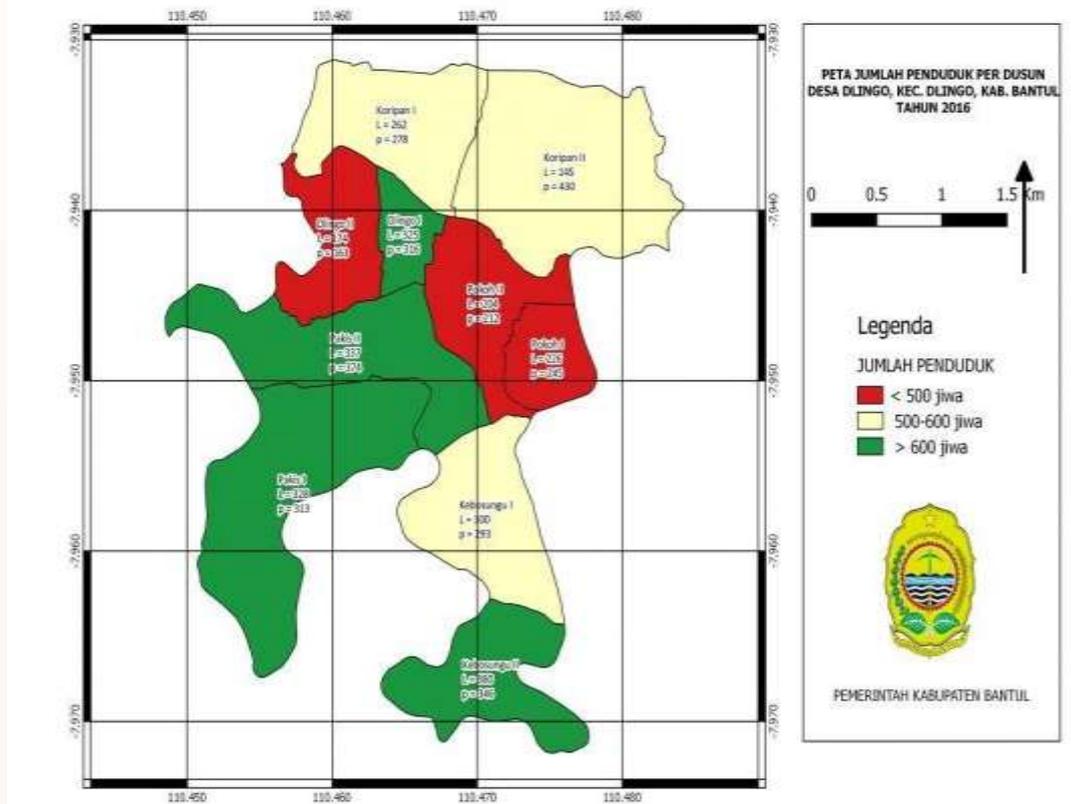
1. Penyuluhan administrasi desa khususnya kependudukan. Tim memberikan edukasi pada pamong desa dan pihak pihak yang terkait mengenai adminitrasi kependudukan dan teksnis penyusunan database kependudukan.
2. Penyusunan Database dan Pendampingan Administrasi Kependudukan Desa

Metode pelaksanaan program pengabdian berikutnya yaitu melalui pendampingan penyusunan data base kependudukan desa. Dalam tahap ini tim mengumpulkan data arsip kartu keluarga yang ada kemudian melakukan input data. Setelah itu tim melakukan verifikasi ke warga mengenai data yang ada dalam kartu keluarga. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh warga yang bertanggungjawab dalam penyusunan database. Pendampingan dilakukan agar pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya dapat diterima dengan baik oleh perangkat tingkat desa sehingga mereka mampu menerapkan dan mengimplementasikan materi yang telah disampaikan dengan baik. Bagi tim, dengan dilakukan pendampingan, maka tim dapat mengetahui tingkat kemampuan dan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa secara langsung. Sehingga, dapat dilakukan pembimbingan lebih lanjut dan perbaikan apabila kemampuan perangkat desa masih kurang. Hasil pendampingan dan survei langsung untuk mendapatkan informasi terkini tentang jumlah penduduk.



PEMBAHASAN

Dusun dlingo 1 memiliki luas wilayah 36 ha dan Dlingo II memiliki luas wilayah 82,2 ha, dimana sekitar $\frac{1}{4}$ luasnya merupakan lahan pemukiman warga, sedangkan sisanya merupakan hutan warga. Administrasi merupakan aktivitas yang penting didalam menciptakan akuntabilitas publik. Salah satu administrasi yang diperlukan dalam pengembangan suatu daerah adalah data tentang kependudukan desa. Gambaran awal data kependudukan desa Dlingo bisa dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Peta Kependudukan Desa Dlingo Tahun 2016

Hasil Observasi

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa dusun Dlingo I dan Dlingo II telah memulai melakukan pendataan kependudukan dengan menerbitkan kartu keluarga. Data kependudukan belum diperbaharui, sehingga perubahan belum tercatat dengan sebagaimana mestinya. Pencatatan juga dilakukan secara manual, database kependudukan tidak terdigitalisasi. Administrasi di Dusun Dlingo I dan II belum memiliki tata kelola administrasi yang terstruktur sehingga penyuluhan merupakan program yang dibutuhkan dan tepat sasaran. Didukung juga dengan berbagai kelompok kegiatan yang membutuhkan pemahaman yang tepat mengenai pengelolaan administrasi. Kemampuan sumberdaya manusia penduduk juga masih terbatas, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dari permasalahan- permasalahan yang ditemukan selama observasi, penulis dan tim kemudian menyusun materi penyuluhan yang diberikan kepada pihak-pihak yang relevan dan diprediksi mampu meningkatkan kualitas data kependudukan.

Penyuluhan Administrasi kependudukan

Kegiatan administrasi dapat menentukan terhadap kesuksesan suatu kegiatan. Namun, faktanya kegiatan administrasi seringkali terabaikan dalam sebuah kegiatan, begitu pula administrasi dalam sebuah pedukuhan. Dengan banyaknya berbagai kegiatan yang dilaksanakan, perlu tata kelola administrasi yang baik dan terstruktur. Sebagaimana observasi yang telah dilaksanakan, didapatkan fakta bahwa tata kelola administrasi dusun di Dlingo masih belum terstruktur dengan rapi. Kondisi



tersebut perlu diperbaiki dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat terhadap pengelolaan administrasi. Tata kelola administrasi ini merujuk pada tata kelola administrasi khususnya administrasi kependudukan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan administrasi dusun ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola administrasi yang baik dan benar sehingga Dusun Dlingo I dan II menjadi pedukuhan yang tertib administrasi.

Pada tahap penyuluhan disosialisasikan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. Sistem yang dibuat dapat memuat data yang ada pada kartu keluarga. Database terdiri dari:

1. Data, berisi data diri dari nama yang bersangkutan (kepala keluarga)
2. Keluarga, Berisi nama-nama anggota keluarga
3. Buat Surat, pembuatan surat pengantar dengan menambahkan nomor dan tanggal pembuatan surat, serta mengisi keperluan warga.
4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan



Gambar 2. Pembukaan Program Pengabdian Masyarakat Di Desa Dlingo



Gambar 3. Tim penyuluhan administrasi Kependudukan



Gambar 4. Pelaksanaan Penyuluhan Administrasi Kependudukan di Dusun Dlingo I dan

Pelaksanaan Pendampingan Administrasi kependudukan

Kegiatan pendampingan administrasi kependudukan dilakukan dengan menyusun database Kependudukan. Tahap pertama dilakukan pengumpulan arsip- arsip kependudukan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, BPJS, dan lain sebagainya yang berkaitan. Program Pembuatan Database Kependudukan ini bertujuan untuk melengkapi seluruh arsip setiap penduduk dalam catatan administrasi dusun. Tidak jarang masih terdapat masyarakat yang belum melengkapi arsip kependudukannya. Oleh karenanya, dengan adanya program Pembuatan Database Kependudukan ini dapat memonitoring data-data kependudukan masyarakat di Dusun Dlingo I dan II.



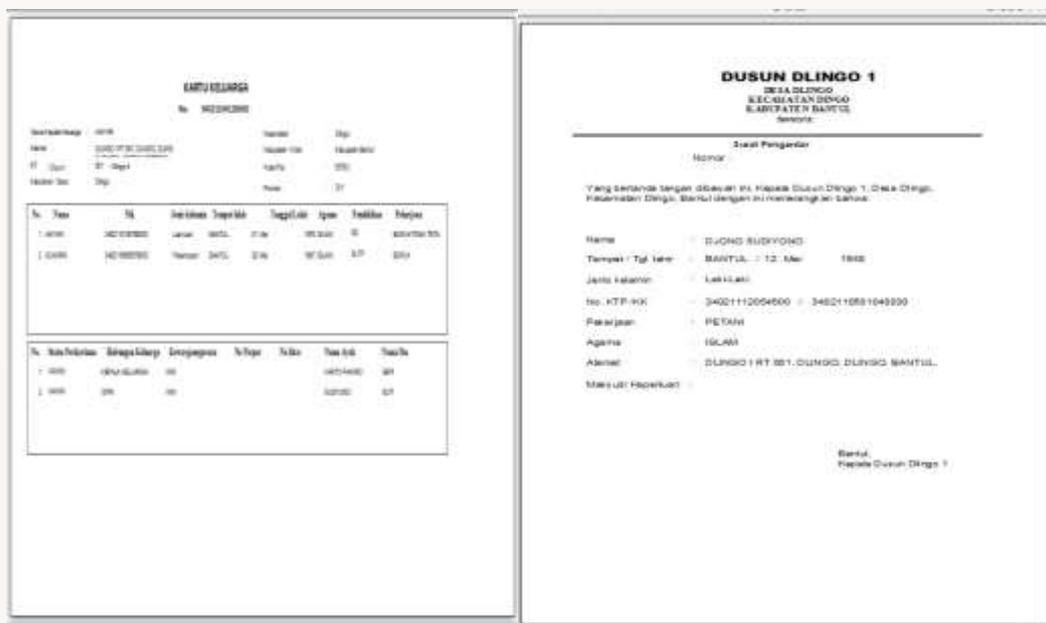
Gambar 5. Pendampingan dan pelaksanaan Penyusunan Database kependudukan Dusun Dlingo I dan II

Masing masing RT yang ada di Dusun Dlingo I dan II telah melakukan pencatatan mulai dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, BPJS, dan lainnya. Setiap RT memiliki arsip dari masing-masing kepala keluarga di Dusun Dlingo I dan II. Data kemudian diverifikasi kewarga dan diperbaiki sesuai dengan perubahan yang terjadi. Data terkini kemudian di input dalam software dengan menggunakan access. Pencatatan digital memudahkan pengelompokkan data kependudukan di Dusun Dlingo I dan II. Pengelompokkan itu seperti mempermudah dalam pencarian jumlah kepala keluarga, banyaknya penduduk berdasarkan jenis kelamin, banyaknya balita, dan lain sebagainya, juga adanya tambahan berupa pembuatan surat pengantar dusun yang lebih praktis sehingga tidak perlu secara manual.

Pencatatan yang dilakukan oleh tim, yaitu pertama mengumpulkan data kependudukan di masing-masing Ketua RT. Kemudian data yang telah didapat diinput kedalam microsoft access satu-persatu. Data yang diinput disesuaikan dengan informasi yang tercantum pada masing-masing kartu keluarga. Pada prosesnya input data yang dilakukan membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Selanjutnya setelah data terinput ke dalam microsoft access, kemudian tim melakukan pelatihan dan penjelasan mengenai penggunaan dari database yang dibuat. Pihak yang diberi pemahaman mengenai database. Output dari program kegiatan Pembuatan Database Kependudukan dan bank data ini selain daripada softcopy dari database, juga berupa arsip kependudukan seperti di tingkat RT untuk keperluan dusun.



Gambar 3. Tampilan software data kependudukan



Gambar 4. Tampilan printout data kartu keluarga dan surat pengantar

PEMBAHASAN

Dari data manual yang dikumpulkan, diperoleh demografi Dusun Dlingo I dan dusun Dlingo II. Demografi data dusun Dlingo I (Tabel 1) dari data kartu kerluarga yang telah dikumpulkan secara manual terdapat 187 jumlah kepala keluarga dari 5 RT, sebagian besar penduduk Dlingo beragama Islam dan 51% penduduk adalah laki laki. Usia produktif sebanyak 71% tetapi 177 penduduk berusia di atas 50 tahun (30,4%). Dari segi pendidikan sebagian besar adalah SD 37,4 dan SMP 28,9% sedangkan SMA 15,4%.

Dilihat dari tingkat pendidikan menunjukkan bahwa perlunya penawaran program- program yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat desa Dlingo I. Perlu juga mengembangkan lapangan kerja diluar bidang pertanian, serta mengembangkan obyek wisata karena desa Dlingo ini memiliki pemandangan alam yang indah sehingga terbuka kesempatan meningkatkan pendapatan desa.

Tabel 1. Demografi Data Kependudukan Dusun Dlingo I

Keterangan	Jumlah	%
Jenis Kelamin		
▪ Laki Laki	299	51,3
▪ Perempuan	284	48,7
Agama		
▪ Islam	578	99,1
▪ Katholik	5	0,9
Usia		
▪ Balita	28	4,8
▪ Usia 6-14	68	11,7
▪ Usia Produktif (15-64)	416	71,4
▪ Usia diatas 64	71	12,2
Status		
▪ Kawin	339	58,2
▪ Belum Kawin	200	34,4
▪ Janda/Duda	43	7,4
Pendidikan		
▪ Diploma	14	2,5
▪ SD	211	37,4
▪ SMP	163	28,9
▪ SMA	87	15,4
▪ Tidak Sekolah	89	15,8
Sebagian besar petani/buruh tani	323	55,4

Demografi data dusun Dlingo II (Tabel 2) dari data kartu keluarga yang telah dikumpulkan secara manual terdapat 105 jumlah kepala keluarga dari 4 RT, sebagian besar penduduk Dlingo II beragama Islam(99,4%) dan 51% penduduk adalah laki laki. Usia produktif sebanyak 70,6% tetapi 108 penduduk berusia di atas 50 tahun (32%). Dari segi pendidikan sebagian besar adalah SD 27% dan SMP 24,3% sedangkan SMA 25,3%.

Tabel 2. Demografi Data Kependudukan Dusun Dlingo II

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin		
▪ Laki Laki	170	51,1
▪ Perempuan	163	48,9
Agama		
▪ Islam	330	99,4
▪ Katholik	2	0,6
Usia		
▪ Balita	15	4,5
▪ Usia 6-14	37	11,1
▪ Usia Produktif (15-64)	235	70,6
▪ Usia diatas 64	46	13,8
Status		
▪ Kawin	183	55,3
▪ Belum Kawin	123	37,2
▪ Janda/Duda	25	7,6
Pendidikan		
▪ Sarjana	1	0,3
▪ Diploma	8	2,7
▪ SD	81	27,0
▪ SMP	73	24,3
▪ SMA	76	25,3
▪ Tidak Sekolah	61	20,3
Sebagian besar petani/buruh tani	121	



Dilihat dari segi pendidikan penduduk desa Dlingo II lebih baik dari D lingo I tetapi masih perlu ditingkatkan. Luas wilayah Dlingo II 82,2 ha tetapi baru ¼ wilayah yang menjadi tempat pemukiman penduduk karena kondisi alamnya yang kurang menguntungkan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pemuda-pemuda desa Dlingo II yang keluar daerah untuk mencari pekerjaan, sehingga perlu dibuat program-program kerja dan pengolahan alam agar masyarakat setempat tidak meninggalkan desanya.

KESIMPULAN

Manajemen administrasi kependudukan yang baik akan mewujudkan administarsi yang tertib. Data kependudukan yang akurat merupakan sumber data dan informasi dalam mengelola pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, membina dan memberdayakan masyarakat.

Penyusunan database kependudukan merupakan program yang penting untuk meningkatkan kualitas informasi, dan program ini dapat dapat ditindak lanjuti oleh pamong desa setempat. Program juga bisa dikembangkan untuk pengabdian selanjutnya, sehingga dapat memuat database yang lebih lengkap seperti data tentang pajak bumi dan bangunan, peserta

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sebagaimana diketahui bahwa mobilitas suatu penduduk itu akan terus berjalan seiring berjalannya waktu, maka dari itu data kependudukan suatu wilayah juga akan terus berganti. Oleh karenanya pengelolaan database yang telah dibuat oleh tim perlu ditindaklanjuti guna memberikan update data terbaru dari Dusun Dlingo I dan II. Software perlu dikembangkan dengan menambah beberapa fasilitas lagi dalam operasi database yang telah ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya kegiatan ini maka pelaksana menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada

1. Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Kepala Desa Dlingo
3. Kepala dusun Dlingo I
4. Kepala Dusun Dlingo II
5. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Djalil, Rizal. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: RMBOOKS
- Lukito, P. K. (2014). Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan. Jakarta: Grasindo
- Undang-undang No.24 Tahun 2013 . Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri 32 Tahun 2006.